

# IMPLEMENTASI AKTIVASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) DI PERKOTAAN DAN PERDESAAN: STUDI KOMPARATIF DI KECAMATAN BABELAN KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT

Rayhan Syaiful Anwar  
NPP. 32.0394

*Asdaf Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat  
Program Studi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil*

Email: [rayhansyaiful@gmail.com](mailto:rayhansyaiful@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: Subiyono, S.H., M.Sc., Ph.d.

## ABSTRACT

**Problem/Background (GAP):** The activation rate of IKD remains low, reaching only 7.02%. **Purpose:** This study aims to understand the implementation of IKD activation in both urban and rural areas. **Method:** The research uses a qualitative method with data collected through interviews, observations, and documentation. The study was conducted at the Department of Population and Civil Registration (Disdukcapil) of Bekasi Regency, with Bahagia Sub-district representing the urban area and Hurip Jaya Village representing the rural area. Data analysis techniques include data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The study is based on the implementation theory of George C. Edward III. **Results/Findings:** The study found that IKD activation in Bekasi Regency is implemented through both online and offline communication channels and by optimizing the existing *Botram* innovation. It also receives support from local government leaders. There are noticeable differences in IKD implementation between urban and rural areas, influenced by both internal and external conditions. **Conclusion:** IKD implementation in Bekasi Regency involves online and offline communication efforts, but public trust in its effectiveness and security remains a challenge. Limited resources are managed through personnel optimization and innovations like *Botram*. The program is supported by local leadership and relevant policies, though the organizational structure for IKD is still unclear and overlaps with other civil registration services.

**Keywords:** Bekasi, IKD, Implementation, Rural, Urban

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Masih rendahnya capaian aktivasi IKD khususnya di Kabupaten Bekasi yang baru mencapai 7,02%. **Tujuan:** penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui implementasi aktivasi IKD di wilayah perkotaan dan pedesaan. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi yang mana berlokasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, Kelurahan Bahagia sebagai representatif wilayah perkotaan dan Desa Hurip Jaya sebagai representatif wilayah pedesaan. Teknik analisis yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan yaitu teori implementasi *Goerge C. Edward*

III. Dalam pendekatan teori ini terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: 1. Komunikasi; 2. Sumberdaya; 3. Disposisi; dan 4. Struktur birokrasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian didapatkan bahwa implementasi aktivasi IKD di wilayah Kabupaten Bekasi melalui komunikasi dalam dan luar jaringan serta mengoptimalkan inovasi *Botram* yang sudah ada selain itu juga mendapatkan dukungan dari pimpinan daerah. Terdapat perbedaan implementasi aktivasi IKD antara Perkotaan dan Pedesaan baik itu kondisi internal ataupun kondisi eksternal. **Kesimpulan:** Implementasi IKD di Kabupaten Bekasi dilakukan melalui komunikasi daring dan luring, namun masih perlu meyakinkan masyarakat soal efektivitas dan keamanannya. Sumber daya yang terbatas diatasi dengan optimalisasi aparatur dan inovasi *Botram*. Program ini mendapat dukungan pimpinan daerah dan kebijakan terkait. Namun, struktur organisasi IKD belum jelas karena masih tercampur dengan layanan kependudukan lainnya.

**Kata kunci:** Bekasi, IKD, Implementasi, Pedesaan, dan Perkotaan

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Transformasi digital merupakan fenomena global yang telah merevolusi cara penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Di era Revolusi Industri 4.0, digitalisasi menjadi strategi utama untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan negara kepada masyarakat (Tulungen, Saerang, & Maramis, 2022). Menurut Mergel, Edelman, dan Haug (2019), digital governance mendorong reformasi birokrasi menuju pelayanan publik yang lebih responsif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Perkembangan ini menuntut setiap pemerintah, termasuk di Indonesia, untuk mempercepat adaptasi teknologi dalam sistem administrasi kependudukan. Salah satu bentuk konkret dari transformasi digital di sektor pemerintahan Indonesia adalah pengembangan Identitas Kependudukan Digital (IKD). IKD merupakan inovasi yang dicanangkan Kementerian Dalam Negeri untuk mewujudkan identitas penduduk berbasis digital yang dapat diakses melalui perangkat gawai. Inovasi ini tidak hanya menyederhanakan proses verifikasi identitas tetapi juga mendukung integrasi data kependudukan secara nasional (Permadi & Rokhman, 2023).

Namun demikian, implementasi IKD menghadapi tantangan yang kompleks, terutama dalam konteks perbedaan karakteristik wilayah antara perkotaan dan pedesaan. Studi yang dilakukan oleh Bella dan Widodo (2024) di Kecamatan Tambaksari menunjukkan bahwa kendala sosialisasi dan literasi digital menjadi hambatan utama dalam adopsi IKD di masyarakat. Temuan serupa juga diungkapkan oleh Armia dan Hertati (2023), yang menemukan bahwa banyak warga belum memahami manfaat IKD secara menyeluruh, terutama di wilayah-wilayah dengan akses internet terbatas. Secara global, beberapa penelitian menggarisbawahi pentingnya kesiapan infrastruktur dan partisipasi masyarakat dalam keberhasilan transformasi digital administrasi publik. OECD (2020) menegaskan bahwa transformasi digital hanya akan berhasil jika didukung oleh tata kelola yang inklusif, keterbukaan data, serta pemberdayaan masyarakat. Janssen dan Weerakkody (2018) juga menekankan bahwa interoperabilitas sistem dan keamanan data menjadi syarat mutlak dalam pelaksanaan e-government, termasuk dalam sistem identitas digital. Di tingkat nasional, peran birokrasi sebagai motor penggerak transformasi digital ditegaskan dalam pidato Dies Natalis IPDN oleh Prabowo (2022), yang menyatakan bahwa birokrasi pemerintahan Indonesia harus bertransformasi secara fundamental menuju pelayanan

publik digital yang terintegrasi, berbasis data, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini penting agar pelayanan yang diberikan pemerintah tidak lagi terjebak pada pola konvensional yang lambat dan birokratis.

Dalam konteks pelayanan kependudukan, digitalisasi seperti IKD merupakan kelanjutan logis dari sistem administrasi kependudukan yang sebelumnya telah dikembangkan melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Ripa'i (2018) menunjukkan bahwa keberhasilan SIAK sangat bergantung pada strategi implementasi yang memperhatikan kapasitas SDM, integrasi antar sistem, serta komitmen politik lokal. Maka, pelaksanaan IKD juga tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor pendukung ini. Lebih jauh lagi, studi oleh Sururama dan Permana (2021) mengenai pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) secara daring di Kota Semarang menegaskan pentingnya keberlanjutan dan keandalan sistem digital dalam layanan administrasi kependudukan. Kegagalan dalam memelihara sistem atau kurangnya dukungan infrastruktur dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya partisipasi dalam program digitalisasi seperti IKD. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis secara lebih dalam bagaimana efektivitas implementasi IKD dalam konteks perbedaan geografis, khususnya antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Selain mengisi celah kajian terdahulu, penelitian ini juga memberikan kontribusi empiris bagi peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital di Indonesia, khususnya dalam sektor administrasi kependudukan.

### **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Meskipun Identitas Kependudukan Digital (IKD) telah menjadi kebijakan nasional untuk mengatasi penyalahgunaan dan pemalsuan KTP elektronik, capaian aktivasi di Kabupaten Bekasi masih rendah, yakni hanya 7,02%. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan pusat dan pelaksanaannya di daerah. Penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada aspek teknis atau kebijakan umum tanpa membedakan konteks wilayah, padahal kondisi di daerah perkotaan dan perdesaan memiliki perbedaan signifikan dalam hal infrastruktur, literasi digital, dan sumber daya aparatur. Selain itu, belum banyak studi yang menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan publik seperti milik George C. Edward III untuk menganalisis implementasi IKD secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji pelaksanaan aktivasi IKD di Kabupaten Bekasi, membandingkan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, serta memberikan rekomendasi untuk optimalisasi program ke depan.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Indonesia telah menjadi fokus berbagai penelitian yang menyoroti aspek kesiapan, efektivitas, tantangan, dan persepsi publik terhadap layanan administrasi kependudukan berbasis digital. Sasongko (2023) dalam penelitiannya di Kabupaten Bandung mengkaji kesiapan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan IKD. Menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III, penelitian ini menemukan bahwa faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi memainkan peran penting dalam keberhasilan implementasi IKD. Namun, tantangan seperti literasi digital masyarakat dan keterbatasan infrastruktur teknologi masih menjadi hambatan signifikan.

Amelia et al. (2024) meneliti tingkat kesiapan elektronik (*e-readiness*) dalam penerapan IKD di Kabupaten Karawang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah telah memiliki infrastruktur dan regulasi yang mendukung, partisipasi masyarakat masih rendah akibat kurangnya pemahaman dan literasi digital. Hal ini menekankan pentingnya edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat. Sihombing et al. (2025) melakukan studi kasus di Kabupaten Dairi dan menemukan bahwa meskipun IKD dapat meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi kependudukan, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya kesiapan masyarakat, dan masalah teknis seperti lupa PIN atau password masih menghambat implementasi yang optimal. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi serta jaminan keamanan data untuk mendorong penerapan IKD secara luas. Setyawan dan Rudita (2023) mengevaluasi kinerja layanan aplikasi IKD di Kota Depok menggunakan kerangka SERVQUAL. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa dimensi responsivitas dan jaminan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kecepatan layanan dan keamanan data sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital. Riyoldi et al. (2023) menganalisis persepsi publik terhadap implementasi Permendagri No. 72 Tahun 2022 tentang IKD di Kota Pontianak dengan menggunakan kerangka Technology Acceptance Model (TAM). Studi ini menemukan bahwa meskipun aplikasi IKD dianggap bermanfaat dan relatif mudah digunakan, masih terdapat kekhawatiran terkait privasi dan keamanan data yang mempengaruhi tingkat adopsi teknologi oleh masyarakat.

Secara global, Mole et al. (2023) membandingkan arsitektur sistem identitas digital nasional di berbagai negara, menyoroti perbedaan antara sistem terpusat dan terdesentralisasi. Penelitian ini menekankan pentingnya keseimbangan antara efisiensi layanan dan perlindungan privasi dalam desain sistem identitas digital. Selain itu, Naghmouchi et al. (2023) menekankan bahwa kerangka hukum dan teknis yang kuat sangat penting untuk keberhasilan implementasi sistem identitas digital nasional, termasuk perlindungan data pribadi dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses perancangan dan pelaksanaan sistem.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian ini menghadirkan kebaruan ilmiah dengan mengkaji secara spesifik implementasi aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Bekasi melalui pendekatan perbandingan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Fokus ini belum banyak dibahas dalam penelitian terdahulu yang umumnya masih berorientasi pada kebijakan nasional atau aspek teknis sistem digitalisasi kependudukan secara umum. Kebaruan lainnya terletak pada penggunaan teori implementasi kebijakan publik George C. Edward III sebagai kerangka analisis untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaan program IKD. Dengan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data langsung dari dua wilayah yang merepresentasikan kondisi geografis dan demografis yang berbeda, penelitian ini memberikan kontribusi empiris yang kuat dan kontekstual dalam memahami dinamika implementasi kebijakan di tingkat lokal. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya menambah khasanah literatur akademik di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, tetapi juga memberikan landasan praktis bagi pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan di daerah.

### **1.5. Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, penelitian ini diarahkan untuk mencapai tiga tujuan utama. Pertama, untuk menggambarkan kondisi riil implementasi aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Bekasi, termasuk bagaimana proses tersebut dijalankan dan tantangan yang dihadapi. Kedua, untuk membandingkan berbagai permasalahan serta faktor penyebab rendahnya capaian aktivasi IKD antara wilayah perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Bekasi, mengingat perbedaan karakteristik sosial, geografis, dan infrastruktur di kedua wilayah tersebut. Ketiga, penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi yang tepat dan aplikatif dalam mengatasi kendala-kendala yang ada, guna mendukung optimalisasi implementasi IKD di Kabupaten Bekasi secara lebih efektif dan merata dan bermanfaat.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memperoleh gambaran yang mendalam dan holistik mengenai implementasi aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di wilayah perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Bekasi. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengeksplorasi realitas sosial dan administratif secara kontekstual melalui interaksi langsung dengan situasi yang diteliti, sebagaimana dikemukakan oleh Patton (2015), bahwa penelitian kualitatif menekankan pentingnya pemahaman mendalam terhadap fenomena melalui pengalaman dan perspektif para pelaku. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali pandangan dan pengalaman informan, observasi digunakan untuk memahami praktik di lapangan, sementara dokumentasi digunakan untuk menguatkan bukti-bukti administratif. Informan dipilih menggunakan teknik purposive dan snowball sampling, yang menurut Simangunsong (2017), memungkinkan peneliti untuk menjangkau narasumber yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dengan objek penelitian. Informan utama meliputi Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, operator pelayanan IKD di tingkat kelurahan dan desa, serta warga masyarakat sebagai pengguna akhir layanan. Mereka dipilih karena memiliki peran strategis dan pengalaman empiris dalam pelaksanaan kebijakan IKD. Lokasi penelitian difokuskan pada Kecamatan Babelan dengan dua lokasi utama, yaitu Kelurahan Bahagia sebagai representasi wilayah perkotaan dan Desa Hurip Jaya sebagai representasi wilayah perdesaan, yang dipilih karena menunjukkan karakteristik sosial, geografis, dan tingkat aktivasi IKD yang berbeda. Penelitian dilaksanakan selama bulan Januari hingga Maret 2025, dengan rangkaian kegiatan lapangan yang mencakup pengumpulan data primer dan pengkajian dokumen administratif untuk membangun analisis yang komprehensif terhadap implementasi kebijakan IKD di Kabupaten Bekasi.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1. Implementasi Aktivitas Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Bekasi**

Implementasi aktivitas Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Bekasi merupakan upaya pemerintah daerah dalam mendukung transformasi digital pelayanan

administrasi kependudukan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan akses data kependudukan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai tantangan, mulai dari rendahnya tingkat partisipasi masyarakat hingga keterbatasan sumber daya aparatur. Oleh karena itu, pembahasan dalam bab ini akan menguraikan bagaimana implementasi IKD dijalankan di Kabupaten Bekasi, termasuk strategi, hambatan, serta dukungan yang terlibat dalam proses aktivasi tersebut.

### **1. Komunikasi Dalam Implementasi Aktivitas Identitas Kependudukan Digital**

Komunikasi menjadi aspek penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan, termasuk dalam aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Bekasi. Pemerintah daerah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) memanfaatkan berbagai media komunikasi, baik secara daring melalui media sosial seperti akun Instagram @disdukcapilkabekasi, maupun secara luring melalui sosialisasi langsung ke sekolah-sekolah dan kecamatan. Media sosial digunakan untuk menyampaikan informasi layanan, termasuk informasi terkait aktivasi IKD, yang telah dipublikasikan melalui ratusan unggahan dengan puluhan ribu pengikut. Salah satu unggahan yang relevan adalah informasi pembaruan aplikasi IKD yang diunggah pada 20 Februari 2025, yang juga menampilkan interaksi dua arah antara petugas dan masyarakat.

Hasil wawancara dengan Kepala Disdukcapil Bekasi menunjukkan bahwa strategi komunikasi dilakukan secara kombinitif, memanfaatkan pendekatan langsung serta media digital agar dapat menjangkau masyarakat luas yang terdiri dari berbagai latar belakang, termasuk pendatang. Kepala Dinas juga mengakui bahwa meskipun sudah ada pemahaman di sebagian masyarakat, masih banyak yang belum memahami urgensi dan manfaat IKD, serta menganggap KTP elektronik masih lebih efektif. Masyarakat juga mempertanyakan regulasi dan penggunaan IKD, serta merasa kebermanfaatannya belum nyata. Selain itu, faktor teknis seperti kebutuhan perangkat smartphone juga menjadi hambatan. Warga Kecamatan Babelan menyatakan bahwa panduan aktivasi IKD sudah cukup jelas, terutama saat ada petugas yang datang langsung. Namun, mereka menekankan pentingnya petugas memberikan penjelasan yang lebih meyakinkan kepada masyarakat lain, serta pentingnya perbaikan sistem IKD agar lebih matang. Masyarakat menganggap proses pengurusan dokumen kependudukan masih sulit dan mahal, sehingga muncul persepsi negatif yang terbawa ke program IKD.

Secara keseluruhan, komunikasi dalam implementasi IKD di Kabupaten Bekasi masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat, kurangnya kepercayaan terhadap efektivitas IKD, serta persepsi bahwa KTP elektronik masih lebih praktis digunakan. Maka, diperlukan upaya komunikasi yang lebih intensif, terarah, dan berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman serta partisipasi masyarakat dalam aktivasi IKD.

### **2. Sumber Daya dalam Implementasi Aktivitas Identitas Kependudukan Digital**

Sumber daya merupakan faktor krusial dalam keberhasilan implementasi kebijakan, termasuk dalam pelaksanaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Bekasi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Bekasi memanfaatkan berbagai bentuk sumber daya, baik yang tersedia maupun yang memungkinkan untuk dioptimalkan. Pelayanan IKD dilakukan di berbagai lokasi,

termasuk di Kantor Disdukcapil, Mall Pelayanan Publik (MPP), serta melalui kegiatan jemput bola di berbagai acara seperti *car free day* dan kerja sama dengan sekolah serta desa melalui inovasi *BOTRAM* (Berkolaborasi Terus Melayani). Inovasi ini bertujuan untuk memperluas jangkauan pelayanan, seperti aktivasi IKD, pencetakan KTP-El, KIA, dan dokumen kependudukan lainnya. Dari sisi teknologi, Dukcapil juga memanfaatkan media digital seperti WhatsApp dan Instagram sebagai sarana layanan dan publikasi informasi, termasuk informasi pembaruan aplikasi IKD. Namun, tantangan besar dihadapi terkait keterbatasan sumber daya aparatur (SDA). Beban kerja pegawai meningkat karena harus menangani berbagai jenis layanan secara bersamaan, baik layanan konvensional (KTP-El, KK, Akta) maupun layanan digital seperti IKD. Pembagian tugas yang belum merata dan keterbatasan SDM berkompentensi khusus, terutama di bidang teknologi informasi, memperburuk kondisi operasional.

Wawancara dengan berbagai pejabat struktural di Dukcapil mengungkapkan bahwa pelayanan masih dilakukan dengan keterbatasan waktu, tenaga, dan fasilitas, seperti tidak tersedianya mobil layanan keliling. Pelayanan jemput bola pun harus menggunakan kendaraan operasional umum, yang membatasi jangkauan mobilitas petugas. Selain itu, integrasi sistem dengan pusat juga menjadi hambatan karena keterbatasan akses dan ketergantungan terhadap data nasional. Meski demikian, Dukcapil tetap berupaya maksimal dalam memberikan pelayanan, termasuk dengan pembagian kerja meski SDM terbatas dan melakukan edukasi kepada masyarakat. Dukungan terhadap inovasi pelayanan, kolaborasi dengan berbagai pihak, serta pemanfaatan teknologi menjadi kunci untuk menutupi keterbatasan sumber daya. Warga yang diwawancarai pun mengapresiasi pelayanan petugas meski mengakui proses membutuhkan waktu lebih karena sistem dan penjelasan tahapan aktivasi yang cukup rinci.

Kesimpulannya, pelaksanaan IKD di Kabupaten Bekasi menunjukkan bahwa meskipun Dukcapil memiliki keterbatasan sumber daya, mereka tetap berinovasi dan berupaya memberikan pelayanan maksimal. Namun, tantangan operasional, keterbatasan aparatur, dan dukungan teknis masih menjadi hambatan utama yang perlu diatasi agar implementasi IKD dapat berjalan lebih optimal.

### **3. Disposisi Dalam Implementasi Aktivitas Identitas Kependudukan Digital**

Disposisi, sebagai variabel penting dalam implementasi kebijakan, mencerminkan perspektif dan sikap para pelaksana serta masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Dalam konteks aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Bekasi, Dukcapil telah menunjukkan inisiatif melalui berbagai strategi, seperti penyebaran informasi lewat media sosial dan pelaksanaan inovasi layanan *Botram* untuk mendorong partisipasi masyarakat. Namun, hasil wawancara dengan berbagai informan menunjukkan bahwa pemahaman dan sikap masyarakat terhadap IKD masih beragam dan cenderung rendah. Masyarakat mempertanyakan keamanan, fungsi, serta urgensi dari IKD, terutama karena mereka masih merasa KTP-el lebih praktis. Selain itu, literasi digital yang belum merata, keterbatasan pemanfaatan teknologi yang hanya sebatas media sosial, serta kekhawatiran tentang penggunaan IKD dalam kehidupan sehari-hari menjadi tantangan tersendiri.

Dari sisi internal Dukcapil, mereka menyadari adanya kesenjangan pemahaman antara kebijakan yang diterapkan dan respons masyarakat. Meski demikian, disposisi internal cenderung positif, ditandai dengan komitmen dan dukungan yang kuat dari pimpinan daerah. Kehadiran pimpinan dalam kegiatan seperti *Botram* menjadi sinyal bahwa

implementasi IKD didukung penuh secara politik dan kebijakan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi IKD memiliki landasan yang kuat dari sisi disposisi internal, namun masih memerlukan penguatan dalam hal literasi dan kepercayaan publik agar penerimaan masyarakat terhadap kebijakan ini semakin meningkat.

#### **4. Struktur Organisasi dalam Implementasi Aktivitas Identitas Kependudukan Digital**

Struktur organisasi merupakan elemen penting dalam pelaksanaan kebijakan, termasuk dalam implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, belum terdapat unit atau struktur khusus yang menangani IKD secara langsung. IKD saat ini masih dianggap bagian dari layanan KTP-el dan ditangani oleh bidang-bidang yang sudah ada seperti Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan. Hal ini menyebabkan kurangnya fokus terhadap IKD, yang berdampak pada belum optimalnya pencapaian target aktivasi.

Hasil wawancara dengan berbagai pejabat internal Dukcapil menunjukkan bahwa mereka menyadari pentingnya penyesuaian struktur organisasi, namun keterbatasan sumber daya manusia (SDM) menjadi hambatan utama. Ketiadaan SDM dengan latar belakang teknologi informasi dan komunikasi digital juga menghambat inovasi layanan yang berbasis digital. Para pegawai saat ini harus menjalankan tugas ganda, menyesuaikan dengan arahan pimpinan dan kebutuhan lapangan tanpa adanya pembagian kerja yang khusus untuk IKD.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa salah satu tantangan utama dalam implementasi IKD di Kabupaten Bekasi adalah belum tersedianya struktur organisasi yang secara khusus menangani program IKD. Keterbatasan SDM dan tumpang tindih tugas menyebabkan pelayanan kurang maksimal, meskipun terdapat komitmen tinggi dari pimpinan dan semangat adaptasi dari para pelaksana. Dibutuhkan evaluasi dan penguatan struktur organisasi untuk menunjang keberhasilan transformasi layanan kependudukan digital secara lebih terfokus dan efisien.

#### **3.2. Perbedaan Implementasi Aktivitas Identitas Kependudukan Digital (IKD) antara daerah perkotaan dan perdesaan di wilayah Kabupaten Bekasi**

Perbedaan implementasi Aktivitas Identitas Kependudukan Digital (IKD) antara daerah perkotaan dan perdesaan dengan mengambil sampel di Kabupaten Bekasi menjadi sebuah gambaran tambahan dalam mengetahui implementasi IKD di Kabupaten Bekasi. Kecamatan Babelan dalam capaian IKD baru di angka 11.134 atau 5.70% dari target yang ditentukan yaitu 58.640. Data capaian IKD di Kecamatan Babelan menunjukkan bahwa dari total 234.830 penduduk, baru 11.134 orang yang telah mengaktivasi IKD, atau sekitar 4,74% dari total penduduk. Jika dilihat lebih detail berdasarkan desa/kelurahan, terdapat variasi capaian yang signifikan sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

**Tabel 1**  
**Capaian IKD di Kecamatan Babelan**

No	Desa/kelurahan	Jumlah Penduduk	Progress Rekam Dinamis	Capaian IKD	% ID dari Total Penduduk	% IKD dari Rekam Dinamis
1	Kelurahan Bahagia	88.583	68.412	5.327	6,01%	7,79%
2	Kelurahan Kebalen Kota	45.672	39.890	3.825	8,37%	9,59%
3	Desa Babelan Kota	28.940	23.152	864	2,99%	3,73%
4	Desa Kebalen	24.521	18.390	572	2,33%	3,11%
5	Desa Muara Bakti	15.643	10.950	246	1,57%	2,25%
6	Desa Pantai Hurip	14.285	8.571	132	0,92%	1,54%
7	Desa Teluk Mati	12.467	7.480	42	0,34%	0,56%
8	Desa Hurip Jaya	4.719	2.142	126	2,67%	5,88%
9	Desa Buni Bakti	10.500	7.350	220	2,10%	3,00%
Total Kecamatan Babelan		245.330	186.337	11.354	4,63%	6,10%

Sumber: diolah oleh peneliti, 2025

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa capaian aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kecamatan Babelan menunjukkan variasi signifikan antar wilayah. Kelurahan Kebalen mencatat persentase capaian IKD tertinggi sebesar 8,37%, sementara Desa Teluk Mati menjadi wilayah dengan capaian terendah, hanya 0,34%. Kelurahan Bahagia, meskipun memiliki jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Babelan yaitu 88.583 jiwa (34,58% dari total penduduk) dan kontribusi capaian IKD terbesar sebesar 47,84% (5.327 dari total 11.134 aktivasi IKD per 17 Januari 2025), namun jika dibandingkan dengan total penduduknya, persentase kepemilikan IKD masih tergolong rendah, yaitu hanya 6,01%. Dengan tingkat kepadatan mencapai 14.333 jiwa/km<sup>2</sup> dan progres perekaman data sebanyak 68.412 jiwa, capaian tersebut mengindikasikan adanya tantangan dalam menjangkau seluruh penduduk meskipun infrastruktur perkotaan tersedia. Sebagai pembanding dari wilayah pedesaan, digunakan Desa Hurip Jaya yang terletak di ujung utara Kecamatan Babelan, berbatasan langsung dengan laut, serta didominasi oleh lahan tambak dan rawa. Karakteristik geografis Desa Hurip Jaya yang terpencil dan berpenduduk jarang menjadikannya representasi yang tepat untuk membandingkan capaian IKD di wilayah pedesaan dengan wilayah perkotaan seperti Kelurahan Bahagia. Perbandingan ini bertujuan untuk menggambarkan disparitas capaian IKD yang dipengaruhi oleh faktor geografis, kepadatan penduduk, serta ketersediaan infrastruktur pelayanan kependudukan.

Desa Hurip Jaya memiliki luas wilayah sebesar 11 km<sup>2</sup>, yang berkontribusi sekitar 18,52% dari total luas Kecamatan Babelan. Namun, luas wilayah tersebut tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang hanya tercatat 4.719 jiwa, menjadikannya sebagai desa dengan jumlah penduduk paling sedikit di Kecamatan Babelan. Jumlah penduduk Desa Hurip Jaya hanya sebesar 1,84% dari total penduduk kecamatan, dengan tingkat kepadatan penduduk paling rendah, yaitu 429 jiwa/km<sup>2</sup>. Tingkat progres rekam dinamis di Desa Hurip Jaya juga tergolong rendah, hanya mencapai 2.142 jiwa atau 45,39% dari total penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat di desa ini masih belum melakukan

proses rekam dinamis. Kondisi ini berbanding lurus dengan capaian aktivasi IKD yang masih sangat minim, hanya tercatat 126 jiwa atau sekitar 2,67% dari total penduduk yang telah mengaktifkan IKD mereka.

Untuk mendapatkan perbandingan yang lebih setara antara wilayah perdesaan, peneliti membandingkan Desa Hurip Jaya dengan Desa Teluk Mati yang juga berada di wilayah pesisir. Meskipun keduanya memiliki karakteristik geografis yang serupa sebagai wilayah pesisir, terdapat perbedaan signifikan dalam capaian aktivasi IKD di kedua desa ini, yang menunjukkan adanya faktor-faktor lain yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam mengaktifkan IKD. Data perbandingan menunjukkan bahwa meskipun Desa Hurip Jaya memiliki penduduk lebih sedikit (4.719 jiwa) dibandingkan Desa Teluk Mati (12.467 jiwa), persentase aktivasi IKD di Hurip Jaya (2,67%) jauh lebih tinggi dibandingkan Teluk Mati (0,34%). Dari penduduk yang sudah melakukan rekam dinamis, 5,88% di Hurip Jaya mengaktifkan IKD, sementara di Teluk Mati hanya 0,56%. Ini menunjukkan bahwa selain ukuran populasi, efektivitas sosialisasi dan akses layanan juga mempengaruhi tingkat aktivasi IKD.

Kelurahan Bahagia memiliki capaian IKD lebih tinggi (9,08%) dibandingkan Desa Hurip Jaya (2,67%). Warga Kelurahan Bahagia mengungkapkan bahwa informasi mengenai kebijakan IKD banyak diterima, meski ada keraguan tentang fungsinya. Sementara itu, di Desa Hurip Jaya, warga merasa kesulitan mengakses layanan dan tidak melihat manfaat langsung dari IKD karena kebanyakan bekerja sebagai nelayan dan pedagang. Meskipun Dukcapil Kabupaten Bekasi telah melakukan Botram di wilayah perkotaan, Desa Hurip Jaya menghadapi kendala akses dan keterbatasan sarana, seperti tidak adanya kendaraan layanan Dukcapil. Hal ini menghambat sosialisasi dan aktivasi IKD di desa tersebut. Secara keseluruhan, perbedaan antara wilayah perkotaan dan pedesaan terletak pada aksesibilitas dan kebutuhan masyarakat, yang mempengaruhi tingkat partisipasi dalam aktivasi IKD.

### **3.3. Rekomendasi Upaya Optimalisasi Aktivitas Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Bekasi**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan capaian IKD, namun masih ada beberapa kendala yang menghambat optimalisasi. Untuk itu, peneliti merekomendasikan beberapa langkah, antara lain: pembentukan Tim Khusus IKD dengan penanggung jawab dari Sekretaris Daerah untuk mendukung kewenangan dan penguatan tim, optimalisasi internal aparatur dengan melibatkan seluruh perangkat daerah dan kecamatan dalam aktivasi IKD, serta penyusunan jadwal Botram bergilir di setiap kecamatan untuk mempermudah akses masyarakat. Selain itu, pengadaan mobil layanan operasional yang dapat diajukan melalui APBD Perubahan atau bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi/Pusat, serta transisi kebijakan penggunaan KTP Elektronik ke IKD agar masyarakat semakin mengenal dan memanfaatkan fungsi IKD dalam berbagai layanan kependudukan.

### **3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kecamatan Babelan, baik di wilayah perkotaan (Kelurahan Bahagia) maupun perdesaan (Desa Hurip Jaya), masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam aspek sosialisasi, literasi digital masyarakat, dan keterbatasan

infrastruktur teknologi informasi. Temuan ini sama halnya dengan temuan penelitian Safitri et al. (2023) di Kelurahan Gunung Anyar Tambak, Surabaya, yang menyebutkan bahwa penerapan IKD belum optimal karena minimnya sosialisasi dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan manfaat IKD.

Lebih lanjut, temuan ini memperkuat penelitian Armia dan Hertati (2023) di Rungkut Kidul yang menemukan bahwa masih terdapat anggapan negatif terhadap IKD di kalangan masyarakat, seperti kekhawatiran akan pencurian data dan kesulitan dalam penggunaan aplikasi. Hal serupa juga ditemui di Desa Hurip Jaya, di mana sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa aktivasi IKD tidak terlalu mendesak dan kurang relevan dengan kebutuhan sehari-hari. Namun demikian, berbeda dengan temuan Bella dan Widodo (2024) yang menyebutkan bahwa dukungan perangkat desa dan tokoh masyarakat menjadi faktor pendorong utama keberhasilan aktivasi IKD di Kecamatan Tambaksari, penelitian ini justru menemukan bahwa di wilayah perdesaan, peran tokoh masyarakat belum optimal dalam mendorong aktivasi IKD. Hal ini mengindikasikan bahwa perbedaan konteks sosial dan struktur kepemimpinan lokal sangat memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan digital.

Temuan ini juga menolak sebagian dari temuan Aprilia (2023) yang menyatakan bahwa komunikasi yang intensif dari petugas Disdukcapil kepada masyarakat cukup efektif dalam meningkatkan aktivasi IKD. Di Kabupaten Bekasi, khususnya di Kelurahan Bahagia, meskipun upaya komunikasi melalui media sosial dan layanan daring telah dilakukan, namun tingkat respons masyarakat tetap rendah, menunjukkan bahwa pendekatan komunikasi yang digunakan belum menyentuh kebutuhan dan pola komunikasi masyarakat secara menyeluruh. Selain itu, temuan penelitian ini memperkaya kajian Sihombing et al. (2025) yang menyatakan bahwa keberhasilan IKD sangat bergantung pada kesiapan perangkat teknologi dan pelatihan staf. Di Kecamatan Babelan, peneliti menemukan bahwa keterbatasan sarana dan prasarana serta beban kerja petugas menjadi faktor utama yang menghambat proses aktivasi IKD secara masif. Dengan demikian, aspek internal organisasi pelaksana juga menjadi faktor kunci yang perlu diperkuat, selain dari aspek eksternal seperti literasi dan kesadaran masyarakat.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan karakteristik wilayah, kondisi sosial masyarakat, dan kapasitas kelembagaan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan IKD, dan hal ini menegaskan pentingnya pendekatan kontekstual dalam menerapkan kebijakan digitalisasi administrasi kependudukan di Indonesia.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis penelitian terkait implementasi aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, dapat disimpulkan bahwa implementasi aktivasi IKD di kabupaten Bekasi berjalan dengan baik. Dukcapil telah melakukan komunikasi dalam dan luar jaringan untuk meyakinkan masyarakat mengenai efektivitas dan keamanan IKD, meskipun terdapat keterbatasan dalam jumlah aparatur. Dukcapil juga melakukan inovasi melalui Botram dengan dukungan pimpinan daerah, namun belum ada struktur organisasi yang jelas terkait tugas dan fungsi IKD. Perbedaan implementasi IKD antara daerah perkotaan dan pedesaan terlihat pada tingkat adaptasi masyarakat terhadap teknologi, di mana perkotaan lebih responsif dibandingkan pedesaan yang masih terfokus pada kebutuhan sehari-hari. Selain

itu, akses ke layanan IKD lebih mudah dijangkau di perkotaan dibandingkan di pedesaan. Untuk mengoptimalkan implementasi IKD, disarankan pembentukan tim khusus IKD, optimalisasi internal aparatur dengan fokus pada aktivasi di lingkungan pemerintahan, pengaturan jadwal Botram di setiap kecamatan, dan pengadaan mobil layanan untuk mendukung distribusi pelayanan kependudukan. **Keterbatasan penelitian** Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya adalah fokus hanya pada Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, sehingga hasil tidak dapat digeneralisasi ke wilayah lain. Selain itu, keterbatasan waktu dan sumber daya menyebabkan jumlah sampel dan informan yang diwawancarai terbatas. Penelitian ini juga tidak mengkaji secara mendalam faktor eksternal yang memengaruhi implementasi IKD, serta tidak dapat mengukur dampak jangka panjang dari penggunaan IKD. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan wilayah dan memperdalam analisis faktor eksternal serta dampak sosial-ekonomi. **Arah masa depan penelitian** Arah masa depan penelitian terkait implementasi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Bekasi dapat difokuskan pada beberapa aspek penting. Penelitian selanjutnya dapat mengevaluasi efektivitas pembentukan tim khusus IKD dan jadwal rutin Botram dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mengkaji dampak penggunaan media sosial dalam sosialisasi fungsi dan manfaat IKD. Selain itu, penting untuk mengkaji lebih dalam perbedaan implementasi IKD antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta merancang strategi yang lebih spesifik untuk masing-masing wilayah guna mengoptimalkan pencapaian aktivasi IKD. Penelitian juga dapat memperdalam pengaruh kebijakan pemerintah dalam mendukung keberhasilan program ini, serta menilai peran infrastruktur dan aksesibilitas dalam mengatasi kendala implementasi, terutama di daerah yang sulit dijangkau. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan untuk pengembangan kebijakan dan solusi praktis dalam optimalisasi implementasi IKD di Kabupaten Bekasi dan daerah lainnya.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten, masyarakat Kelurahan Bahagia, masyarakat Kelurahan Hurip Jaya, beserta seluruh informan lainnya yang telah memberikan data dan informasi berharga untuk keberhasilan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada dosen pembimbing dan civitas akademika Institut Pemerintahan Dalam Negeri atas bimbingan dan dukungannya selama proses penyusunan skripsi. Tak lupa, saya juga berterima kasih kepada keluarga dan rekan-rekan yang telah memberikan semangat dan motivasi hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, R., Suryani, N., & Hakim, M. (2024). E-Readiness Pemerintah Daerah dalam Implementasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Karawang. *Jurnal Transformasi Pelayanan Publik*, 7(1), 15–27.
- Aprilia, R. R. V. (2023). Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Balai RW Kelurahan Kalirungkut Surabaya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(4), 144–152.
- Armia, S., & Hertati, D. (2023). Pendampingan pelayanan Identitas Kependudukan Digital di Kelurahan Rungkut Kidul guna meningkatkan pelayanan adminduk berbasis digital. *Jurnal Dedikasi*, 3(2), 144–152.

- Bella, V. S., & Widodo, D. (2024). Implementasi aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam menunjang pelayanan publik masyarakat di Kecamatan Tambaksari. *SARAQ OPAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Pemerintahan*, 6(1), 14–31.
- Janssen, M., & Weerakkody, V. (2018). Realizing a digital government: What are the chances? *Information Systems Frontiers*, 20, 531–548.
- Mergel, I., Edelman, N., & Haug, N. (2019). Defining digital transformation: Results from expert interviews. *Government Information Quarterly*, 36(1), 101–113. [https://www.researchgate.net/publication/334028741\\_Defining\\_digital\\_transformation\\_Results\\_from\\_expert\\_interviews](https://www.researchgate.net/publication/334028741_Defining_digital_transformation_Results_from_expert_interviews)
- Mole, Callum & Chalstrey, Ed & Foster, Peter & Hobson, Timothy. (2023). Digital identity architectures: comparing goals and vulnerabilities. 10.48550/arXiv.2302.09988. [https://www.researchgate.net/publication/368664352\\_Digital\\_identity\\_architectures\\_comparing\\_goals\\_and\\_vulnerabilities](https://www.researchgate.net/publication/368664352_Digital_identity_architectures_comparing_goals_and_vulnerabilities)
- Naghmouchi, Montassar & Laurent, Maryline & Claire, Levallois-Barth & Kaaniche, Nesrine. (2023). Comparative Analysis of Technical And Legal Frameworks Of Various National Digital Identity Solutions. 10.13140/RG.2.2.23487.73129. [https://www.researchgate.net/publication/380793187\\_COMPARATIVE\\_ANALYSIS\\_OF\\_TECHNICAL\\_AND\\_LEGAL\\_FRAMEWORKS\\_OF\\_VARIOUS\\_NATIONAL\\_DIGITAL\\_IDENTITY\\_SOLUTIONS](https://www.researchgate.net/publication/380793187_COMPARATIVE_ANALYSIS_OF_TECHNICAL_AND_LEGAL_FRAMEWORKS_OF_VARIOUS_NATIONAL_DIGITAL_IDENTITY_SOLUTIONS)
- OECD. (2020). *Digital Government in the Post-COVID Era*. OECD Publishing.
- Permadi, I. B., & Rokhman, A. (2023). Digitalisasi identitas penduduk dalam administrasi kependudukan. *Joppas: Journal of Public Policy and Administration*, 4(2), 80–88.
- Prabowo, H. (2022). Transformasi birokrasi pemerintahan menuju pelayanan publik digital. Pidato Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri dalam Sidang Senat Terbuka Dies Natalis ke-65 IPDN. Jatinangor: IPDN Press.
- Ripa'i, A. (2018). Strategi implementasi sistem informasi administrasi kependudukan (SIK). *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(1), 35–45.
- Riyoldi, A., Maulana, R., & Wibowo, T. (2023). Persepsi Masyarakat Terhadap Implementasi Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Identitas Kependudukan Digital di Kota Pontianak. *Jurnal Inovasi Administrasi Publik*, 11(2), 102–113.
- Safitri, D. V., Permatasari, M., & Azizah, N. (2023). Partisipasi masyarakat terhadap penggunaan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk mendorong tertib administrasi kependudukan di Kelurahan Gunung Anyar Tambak. *IJPA – The Indonesian Journal of Public Administration*, 4(2), 88–98.
- Sasongko, D. H. (2023). Analisis Implementasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Bandung Menggunakan Model Edward III. *Jurnal Pemerintahan Daerah*, 14(2), 88–97.
- Setyawan, A., & Rudita, I. (2023). Evaluasi Kinerja Layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Berdasarkan Model SERVQUAL di Kota Depok. *Jurnal Pelayanan Publik Terpadu*, 5(3), 49–61.
- Sihombing, R., Simbolon, J., & Sitanggang, M. (2025). Studi Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Dairi. *Jurnal Reformasi Birokrasi*, 9(1), 1–13.
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi penelitian pemerintahan*. Alfabeta.
- Tulungen, E. E. W., Saerang, D. P. E., & Maramis, J. B. (2022). Transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan. *Jurnal EMBA*, 10(2), 1116–1123.